

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan ekonomi rakyat yang memiliki lingkup kecil yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau kelompok. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah pilar perekonomian Indonesia yang perlu mendapat perhatian karena dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di tengah persaingan pada pekerjaan sektor formal. Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. [1]

Akibat terjadi pandemi virus Covid-19 sejak Maret 2020 berdampak di banyak negara, termasuk Indonesia. Dari pandemi tersebut hingga saat ini mengakibatkan dampak pada beberapa sektor yang ada di Indonesia salah satunya adalah sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi, dampak tersebut mempengaruhi kedudukan konsumsi masyarakat yang tinggi dan kedudukan konsumsi masyarakat yang rendah akan menyebabkan penurunan anggaran nasional sehingga menurunkan perkembangan ekonomi di Indonesia. Mengingat banyaknya dan pentingnya peran dari UMKM bagi pemerintah dan masyarakat, maka berbagai upaya dilakukan agar UMKM tetap berjalan dan berkembang dengan mengatasi berbagai faktor yang menjadi kendala. Untuk mendukung pemulihan ekonomi kembali bagi pelaku usaha kecil dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan, pemerintah turut memberikan Bantuan Presiden (Banpres) dengan menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dilansir pada portal website dpr.go.id pada tanggal 22 September 2022, Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 Tanggal 20 September 2022 sebesar Rp1,407 triliun. Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI, akan mendukung Kementerian

Koperasi dan UKM RI atas pengusulan Alokasi Anggaran Program BPUM Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2022 sebesar Rp1,200 triliun. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi mengumpulkan data seluruh UKM yang mendaftar sebagai target. Berdasarkan data yang di dapat pada open data jabar, Kota Bekasi sendiri memiliki sekitar 274 ribu pelaku usaha UMKM. Diperoleh data dari Dinas Koperasi dan UKM, penerima bantuan BPUM pada tahun 2020-2021 adalah sekitar 43 ribu pelaku usaha UMKM. Namun, proses dalam menentukan dan menyaring pelaku usaha mana yang memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan bantuan modal usaha tidaklah mudah. Tentunya setiap pelaku usaha penerima BPUM harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah misalnya, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki KTP elektronik, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, bukan ASN, anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN atau BUMD. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyaluran BPUM meliputi calon penerima yang mengusulkan, pembersihan data dan validasi data calon penerima, penetapan penerima, pencairan dana BPUM, dan laporan penyaluran.

Dari Dinas Kota Bekasi dalam menentukan penerima bantuan UMKM masih mengalami kesulitan mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Dikarenakan belum adanya sistem yang dapat membantu keputusan secara tepat. Sebelumnya pemilihan penerima bantuan hanya dilakukan oleh pihak bank yang bekerjasama. Pihak bank menyotir calon penerima dengan mengecek status apakah peserta memiliki pinjaman kredit usaha rakyat atau terdaftar pada bantuan lain, serta apakah peserta sudah mendapatkan BPUM sebelumnya. Penetapan teknis dalam pemberian bantuan dari Dinas Kota Bekasi memberikan dampak pada pelaku UMKM produktif yang tidak tepat sasaran. Adapun kriteria yang sudah ditentukan yaitu alamat tempat tinggal sesuai KTP serta tempat usaha, bidang usaha, terdaftar pada pinjaman kredit usaha rakyat atau terdaftar pada bantuan lain secara simultan dan sudah menerima BPUM sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu dalam pemilihan UMKM yang tepat untuk diberikan bantuan. Maka pada penelitian yang akan dibahas ini terdapat kasus di mana data memiliki multi kriteria untuk dianalisa hingga menghasilkan sebuah referensi (pendukung) untuk pengambilan keputusan. Sistem pemberian bantuan UMKM menggunakan sistem pendukung keputusan dengan algoritma *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA).

Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA) adalah multiobjektif sistem mengoptimalkan dua atau lebih attribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Dalam kasus penerimaan bantuan UMKM, terdapat banyak aspek yang harus dipertimbangkan, seperti potensi bisnis, aspek sosial, keuangan, dan lainnya. *Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis* (MOORA) dapat dengan efisien mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria ini. Metode *Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis* (MOORA) mengubah keputusan multi-kriteria menjadi satu skor atau nilai yang relatif, memudahkan perbandingan antar alternatif secara langsung. Ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan memfasilitasi pemeringkatan alternatif secara lebih sistematis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah atau lembaga yang terkait dalam memilih UMKM mana yang layak untuk diberikan bantuan, serta bagi UMKM itu sendiri dalam memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penggunaan metode penilaian yang digunakan saat ini masih kurang dalam proses perhitungan, sehingga membutuhkan metode yang lebih efektif dalam menilai kelayakan penerima bantuan.

2. Proses mekanis sebelumnya hanya menggunakan record pada bank, sehingga pemilihan bantuan kurang objektif.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) dalam menentukan penerima BPUM untuk pelaku usaha UMKM?
2. Bagaimana menghasilkan sistem pendukung keputusan penerima BPUM untuk pelaku usaha UMKM berbasis web dengan penerapan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) pada sistem?

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya akan fokus pada analisis multi-kriteria menggunakan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) untuk menentukan alternatif UMKM yang layak mendapatkan bantuan.
2. Sistem pendukung keputusan yang akan dikembangkan hanya akan terdiri dari fitur-fitur yang diperlukan untuk melakukan analisis multi-kriteria dan menentukan alternatif UMKM yang layak mendapatkan bantuan.
3. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa PHP dan database MySql.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber dari data primer yang diperoleh dari instansi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Adapun data-data tersebut adalah berupa data penerima bantuan UMKM di Kota Bekasi tahun 2022 .
5. Sistem pendukung keputusan yang akan dibangun hanya untuk menentukan penerima bantuan pelaku usaha mikro untuk UMKM.
6. Wilayah yang menjadi fokus penelitian adalah wilayah tertentu.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) dalam proses menentukan penerima bantuan program BPUM untuk UMKM di Kota Bekasi.
2. Menghasilkan sistem pendukung keputusan bantuan UMKM dengan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan dalam pemberian bantuan UMKM di Kota Bekasi.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Membantu pihak dinas terkait dalam memudahkan proses pengambilan keputusan dalam pemberian bantuan program BPUM untuk UMKM di Kota Bekasi dengan tepat.
2. Menghasilkan sistem dengan mempertimbangkan bobot dan kriteria yang telah ditentukan sehingga sistem ini dapat dengan mudah untuk dioperasikan.

1.7. Sistematika Tugas Akhir

Laporan penelitian ini dibagi menjadi tiga bab yang dilengkapi dengan penjelasan, Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan dasar pemikiran, kebutuhan atau alasan yang menjadi ide penulis untuk mengangkat judul tersebut menjadi judul skripsi, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Adapun tinjauan pustaka yang diuraikan oleh penulis adalah : penelitian terkait, sistem pendukung keputusan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA), model pengembangan *waterfall*, UML (*Unified Modeling Language*), website, (*Hypertext Preprocessor*) PHP, XAMPP, dan *blackbox testing*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan objek penelitian, model pengembangan sistem, kerangka penelitian, tahap penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, analisa masalah pada sistem yang berjalan, analisis permasalahan, kebutuhan sistem, penerapan metode/algoritma, dan desain sistem baru menggunakan *Activity Diagram*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan perhitungan *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA). Perancangan sistem dengan UML (*Unified Modeling Language*). Perancangan database yang menjelaskan struktur database. Implementasi antarmuka, dan pengujian sistem dengan *blackbox*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pemecahan masalah yang telah didefinisikan sebelumnya serta saran berisikan kelemahan sistem yang dibangun dan dianggap penting untuk diperhatikan atau dijalankan pada masa yang akan datang untuk kesempurnaan hasil penelitian.